

ABSTRAK

FLEKSIBILITAS DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

(STUDI KASUS RSUD HM. RYACUDU KOTABUMI LAMPUNGUTARA)

Oleh:

Eurofanya Meghawanda

Ratio logis pengecualian pengaturan pengadaan barang atau jasa pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah ditujukan untuk tercapainya percepatan pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh terhenti. Hal tersebut merupakan akibat dari fleksibilitas pengelolaan keuangan pada BLUD, sehingga berpengaruh pada pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh BLUD.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dikaji berdasarkan pada hukum yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori dan doktrin ilmu hukum yang relevan dengan tema penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai BLUD dan untuk menganalisis bentuk fleksibilitas Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Penelitian ini menghasilkan salah satu aspek fleksibilitas yaitu kemampuan BLUD untuk mengelola pendapatannya secara langsung untuk membiayai kebutuhan Badan Layanan Umum. Bentuk fleksibilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara meliputi jenjang nilai, metode pemilihan, pelaku pengadaan dan kedudukan pelaku pengadaan. Fleksibilitas ini diharapkan akan menjadikan pengadaan barang/ jasa di RSUD HM. Ryacudu Kotabumi Lampung Utara yang menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa menjadi lebih bermutu, lebih murah, dengan proses sederhana, cepat dan mudah menyesuaikan kebutuhan. Apabila pengadaan barang/ jasa pada BLUD menggunakan skema pengelolaan keuangan negara pada umumnya yang harus melalui serangkaian tahapan yang panjang, maka bisa jadi pelayanan masyarakat akan terganggu. Selain itu, pengecualian tersebut juga ditujukan untuk menegaskan bahwa pengadaan barang atau jasa pada BLUD tidak tunduk pada ketentuan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Kata Kunci: Badan Layanan Umum Daerah, Fleksibilitas, Pengadaan Barang Dan Jasa

ABSTRACT

FLEXIBILITY IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES OF REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCIES (CASE STUDY AT RSUD HM. RYACUDU KOTABUMI NORTH LAMPUNG)

By:

Eurofanya Meghawanda

The logical ratio of exceptions to the regulation of the procurement of goods or services at the Regional Public Service Agency (BLUD) is aimed at achieving the acceleration of services to the community that should not be stopped. This is a result of the flexibility of financial management at BLUD, so that it affects the procurement of goods or services carried out by BLUD.

This research is normative juridical research that is studied based on written laws such as laws and regulations, theories and doctrines of legal science that are relevant to the research theme. This research was conducted to analyze the Procurement of Goods and Services at HM Hospital. Ryacudu Kotabumi North Lampung as a BLUD and to analyze the form of flexibility of Procurement of Goods and Services at HM Hospital. Ryacudu Kotabumi North Lampung as a Regional Public Service Agency.

This study found that one aspect of flexibility is the ability of BLUD to manage its revenue directly to finance the needs of the Public Service Agency. Forms of flexibility in the Procurement of Goods and Services at HM Hospital. Ryacudu Kotabumi North Lampung includes value levels, selection methods, procurement actors and the position of procurement actors. This flexibility is expected to make the procurement of goods/services at HM Hospital. Ryacudu Kotabumi North Lampung which ensures the availability of goods and / or services to be of higher quality, cheaper, with a simple process, fast and easy to adjust to the needs. If the procurement of goods/services at BLUD uses the general state financial management scheme that must go through a series of long stages, it is possible that community services will be disrupted. In addition, the exception is also intended to emphasize that the procurement of goods or services at BLUD is not subject to the provisions of government procurement of goods or services..

Keywords: *Flexibility, Procurement of Goods and Services, Regional Public Service Agency*

